

**Efektivitas Penagihan Tunggakan PPh dengan Surat Paksa
di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu
Periode 2011-2013**



Skripsi Oleh:

Themy Ratnafuri
(01111303017)
Akuntansi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Gelar Sarjana Ekonomi*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
2014

TANDA PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

Efektivitas Penagihan Tunggakan PPh dengan Surat Paksa
di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu
Periode 2011-2013

Disusun oleh :


Nama : Themy Ratnaferi
NIM : 01111303017
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif


Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal : 11 / 4 / 2014

Ketua : 
Dra. Kencana Dewi, M.Sc, Ak.
NIP. 195707081987032006

Tanggal : 10 / 4 / 2014

Anggota : 
Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak.CA.
NIP. 196508161995121001

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Efektivitas Penagihan Tunggakan PPh dengan Surat Paksa
di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu
Periode 2011-2013

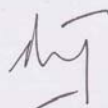
Disusun oleh :

Nama : Themy Ratnafuri
NIM : 01111303017
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentarsi : Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 19 Mei 2014 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

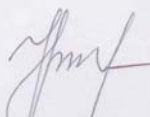
Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, Mei 2014

Ketua



Dra. Kencana Dewi, MSc, Ak
NIP. 195707081987032006

Anggota



Ahmad Subeki, SE, MM, Ak
NIP. 196508161995121001

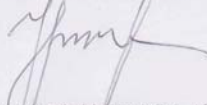
Anggota



Ika Sasti Ferina, SE, M.Si, Ak
NIP. 19780210200112001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Ahmad Subeki, SE, MM, Ak
NIP. 196508161995121001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Themy Ratnafuri
NIM : 01111303017
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentarsi : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:
**"Efektivitas Penagihan Tunggakan PPh dengan Surat Paksa di KPP
Pratama Palembang Seberang Ulu Periode 2011-2013"**

Pembimbing :

Ketua : Dra. Kencana Dewi, M.Sc, Ak.
Anggota : Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak.
Tanggal Ujian : 19 Mei 2014

Adalah benar hasil karya Saya sendiri dibawah bimbingan tim pembimbing.
Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan
sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini Saya buat sebenar-benarnya, dan apabila pernyataan
Saya ini tidak benar dikemudian hari, Saya bersedia dicabut predikat kelulusan
dan gelar kesarjanaan.

Palembang, Mei 2014

Pembuat Pernyataan

METERAI
TEMPEL
A9526ACF203607862
6000
DJP
Themy Ratnafuri

SURAT PERNYATAAN

Kami dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa:

Nama : Themy Ratnafuri

NIM : 01111303017

Judul : **Efektivitas Penagihan Tunggakan PPh dengan Surat Paksa
di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Periode 2011-
2013**

Telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Palembang, Mei 2014

Pembimbing Skripsi;


Ketua



Dra. Kencana Dewi, M.Sc, Ak.

NIP. 195707081987032006

Anggota



Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak.

NIP. 196508161995121001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Bila kegagalan itu bagai hujan dan keberhasilan bagaikan matahari, maka aku butuh keduanya untuk melihat pelangi"

(Kagome_Inuyasa)

"Jadilah seperti bambu, tetap lentur meskipun angin yang menerjangmu semakin kencang"

(Kungfu Boy)

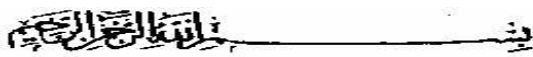
"Jangan menyerah...tak ada yang memalukan dari jatuh, yang memalukan adalah kalau tidak berdiri lagi"

(Midorima_KNB)

Skrripsi ini kupersembahkan kepada:

- Allah SWT.
- Kedua Orangtuaku tercinta
- Adik-adikku terkasih
- Sahabat-sahabatku tersayang
- Almamaterku

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **"Efektivitas Penagihan Tunggakan PPh dengan Surat Paksa di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Periode 2011-2013"** tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu Bab I : Pendahuluan, Bab II : Tinjauan Pustaka, Bab III: Gambaran Umum KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, serta Bab V : Kesimpulan dan Saran.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, diketahui bahwa penagihan tunggakan PPh dengan cara melakukan penerbitan surat paksa di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu pada periode 2011-2013 tidak efektif. Hal ini ditunjukkan dengan ketiga tingkat rasio efektivitas yang diperoleh termasuk kategori tidak efektif karena berada $< 60\%$. Sedangkan, tingkat Rasio Penerimaan Tunggakan PPh (RPTP) berada $< 10\%$ artinya penagihan tunggakan PPh dengan penerbitan surat paksa kurang berkontribusi terhadap penerimaan PPh di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu pada periode 2011-2013. Setiap periode mengalami perbedaan persentase efektivitas, hal ini banyak dipengaruhi oleh kendala *intern*, seperti surat paksa yang tidak sampai ke tujuan karena alamat yang diberikan salah hingga kendala *ekstern*, seperti banyaknya Wajib Pajak yang

tidak acuh terhadap surat paksa karena kurangnya kesadaran dalam memenuhi kewajiban untuk membayar tunggakan PPh.

Sehingga, penulis menyarankan KPP Pratama Palembang Seberang Ulu untuk *update* data Wajib Pajak, memantau WP yang paling banyak melakukan tunggakan PPh, dan meningkatkan sosialisasi terhadap WP atas kekuatan hukum yang dimiliki surat paksa.

Penulis menyadari akan segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis, maka kritik serta saran dari semua pihak yang bersifat membangun akan berguna bagi penulis sebagai bahan masukan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan tunggakan PPh dengan surat paksa termasuk kontribusinya terhadap penerimaan PPh di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Semoga Allah SWT selalu memberikan Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua, Amien.

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah dengan seluruh kerendahan hati saya panjatkan kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan segala berkah, nikmat, serta karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **”Efektivitas Penagihan Tunggakan PPh dengan Surat Paksa di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Periode 2011-2013”** sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian komprehensif dan mencapai gelar sarjana ekonomi pada program Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya.

Oleh karena itu, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang terlibat dalam memberikan bantuan, bimbingan, serta dorongan moril maupun materil sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Maka, izinkanlah saya sebagai penulis untuk mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Badia Parizade, M.BA, Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Prof. Dr. Taufiq, S.E., M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Rina Tjandrakirana, S.E., M.M, Ak., Ketua Program Ekonomi Universitas Sriwijaya dan selaku Ketua Program Ekstention Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak., Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai Pembimbing II.

5. Drs. Burhanudin, M.Acc, Ak., Pembimbing Akademik.
6. Dra. Kencana Dewi, M.Sc, Ak., Pembimbing I Skripsi yang telah membantu dan membimbing dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Semua Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Palembang.
8. Pimpinan dan Staf Karyawan KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.
9. Kedua orang tuaku tercinta, adik-adikku terkasih, Gerryza Razputiano Tuah, Ahmad Al-Faqah Ameizu dan Ahmad Al-Fiqih Ameizu yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dalam menyelesaikan Skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, khususnya angkatan 2011.
11. Teman-temanku dari Dynasty Community, Geng Kayu Putih, dan SIB yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Saya berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, terimakasih atas bantuannya, semangat, serta doanya semoga mendapatkan balasan pahala yang besar dari Allah SWT. Amien Ya rabbal'amin.

Penulis,

Themy Ratnafuri

ABSTRAK

Efektivitas Penagihan Tunggakan PPh dengan Surat Paksa di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Periode 2011-2013

Oleh:

Themy Ratnafuri

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S.1. di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya. Judul skripsi ini adalah **"Efektivitas Penagihan Tunggakan PPh dengan Surat Paksa di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Periode 2011-2013"**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas penagihan tunggakan PPh dengan penerbitan surat paksa, sekaligus mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan tunggakan PPh dengan penerbitan surat paksa terhadap total penerimaan PPh di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Periode 2011-2013.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif berdasarkan fenomena yang muncul terkait penagihan tunggakan PPh dengan surat paksa yang melakukan perhitungan Rasio Efektivitas dan Rasio Penerimaan Tunggakan PPh (RPTP). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penagihan tunggakan PPh dengan menerbitkan surat paksa di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu tidak efektif karena ketiga periode masuk dalam klasifikasi efektivitas terendah yaitu $<60\%$. Sedangkan, pencairan tunggakan PPh untuk periode 2011 sampai 2013 dinyatakan sangat kurang berkontribusi untuk penerimaan PPh di KPP Pratama Palembang, karena ketiganya hanya memperoleh persentase rasio kontribusi sebesar 0,05%, 1,88%, dan 2,15% berada dalam persentase kontribusi terendah yaitu $<10\%$. Sedangkan, adanya perbedaan tingkat efektivitas penagihan tunggakan PPh dengan surat paksa pada tiga periode di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, cenderung terjadi akibat surat paksa yang telah diterbitkan oleh KPP Pratama Palembang Seberang Ulu tidak berhasil diterima oleh WP yang masih mengemban tunggakan PPh karena alamat yang diberikan salah.

Kata Kunci : *Penagihan, Tunggakan PPh, Surat Paksa, Penerimaan PPh, Efektif, Kontribusi*

ABSTRACT

Effectiveness Billing Debt of Income Tax by Forced Letter in KPP Pratama Palembang Seberang Ulu 2011-2013 Period

By:

Themy Ratnafuri

This research is made as one of the requirements for completing studies at the Faculty of Economics S.1. Accounting Department Sriwijaya University. Title of this research is " **Effectiveness Billing Debt of Income Tax by Forced Letter in KPP Pratama Palembang Seberang Ulu 2011-2013 Period** ". This study aims to determine the extent of the effectiveness of the collection of overdue income tax by issuing a forced letter, in effect acknowledging the contribution of the collection of overdue income tax enforced by the issuance to totally revenue of income tax in KPP Pratama Palembang Seberang Ulu towards 2011 until 2013 period.

This research was conducted using qualitative analysis techniques based on the phenomenon that appears related billing debt of income tax by forced letter that perform calculations and Effectiveness Ratio and Revenue of Income Tax Ratio (RPTP). The results of this study indicate that Billing debt of income tax by forced letter in KPP Pratama Palembang Seberang Ulu is not effective because of the third period fall into low classification effectiveness is $< 60\%$. Meanwhile, income tax disbursement for 2011 until 2013 period revealed very less contribute to revenue of income tax in KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, because it simply obtains the percentage contribution ratio of 0.05% , 1.88% , and 2.15% which the lowest in the percentage contribution is $< 10\%$. Meanwhile, the difference in the level of effectiveness of the collection of overdue income tax by forced letter on the three periods in KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, tends to occur as a result of forced letter that has been issued by KPP Pratama Palembang Seberang Ulu is not successfully received by the WP since the address given is wrong.

Keywords : Billing, Debt of Income Tax, Forced Letter, Revenue of Income Tax, Effective, Contributions

RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa : Themy Ratnafuri
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang / 14 Oktober 1989
Agama : Islam
Alamat : Jl. Radio No. 2016 RT. 27 RW. 09, Kel. 20 Ilir
D.IV, Kec. Ilir Timur I, Palembang 30128
Alamat E-mail : themyratnafuri@gmail.com

Pendidikan Formal

Sekolah Dasar (SD) : SD Negeri 98 Palembang
SLTP : SLTP Negeri 3 Palembang
SMU : SMU Negeri 3 Palembang
Diploma Tiga (D3) : Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang

Pengalaman Organisasi

: - Stasiun Musik Indie Palembang
- Dynasty Community
- Sedekah Iringi Berkah (SIB)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
TANDA PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH.....	iv
SURAT PERNYATAAN <i>GRAMMAR</i>	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
UCAPAN TERIMAKASIH	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
RIWAYAT HIDUP	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Metodologi Penelitian.....	7
1.5.1. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.5.2. Rancangan Penelitian.....	8
1.5.3. Sumber Data.....	9
1.5.3.1. Metode Pengumpulan Data.....	10
1.5.4. Teknik Analisis.....	11
1.5.4.1. Teknik Perhitungan Efektivitas.....	12

1.6. Sistematika Skripsi.....	15
BAB II TINJAUAN PUSATAKA	17
2.1. Landasan Teori.....	17
2.1.1. Pengerttian Pajak.....	17
2.1.2. Jenis Pajak.....	17
2.1.3. Timbul dan Hapusnya Tunggakan Pajak.....	18
2.1.4. Sanksi Pajak.....	19
2.1.5. Surat Paksa.....	20
2.1.5.1. Pengertian Surat Paksa.....	20
2.1.5.2. Isi Surat Paksa.....	21
2.1.5.3. Penerbitan SP&Tata Cara Pemberitahuannya.....	21
2.1.5.4. Manfaat Penagihan Pajak dengan SP.....	23
2.1.6. Penagihan Tunggakan Pajak dengan SP (PPSP).....	23
2.1.6.1. Tunggakan Pajak Penghasilan (PPh).....	24
2.1.7. Pengertian Efektivitas.....	25
2.1.8. Pengertian Penerimaan Pajak.....	25
2.2. Penelitian Sebelumnya.....	25
2.2.1. Pengembangan dari Penelittian Sebelumnya.....	27
2.3. Kerangka Pemikiran.....	29
 BAB III GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA PALEMBANG	
SEBERANG ULU.....	31
3.1. Gambaran Umum KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.....	31
3.2. Visi dan Misi.....	32
3.3. Struktur Organisasi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.....	32
3.4. Tugas Pokok dan Fungsi.....	34
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1. Hasil Penelitian.....	37
4.1.1. Perkembangan Tunggakan PPh di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.....	37

4.1.2. Rekapitulasi Penerbitan SP untuk Menagih Tunggalan PPh di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.....	40
4.1.3. Rekapitulasi Perkembangan Penerimaan PPh di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.....	42
4.1.4. Perbandingan SP Terbit dan SP Bayar atas Penagihan Tunggalan PPh di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.....	43
4.1.5. Penagihan Tunggalan PPh di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu disetiap Periode.....	46
4.2. Pembahasan.....	48
4.2.1. Efektivitas Penagihan Tunggalan PPh dengan SP di KPP Pratama Seberang Ulu Periode 2011-2013.....	48
4.2.2. Kontribusi Pencairan Tunggalan PPh dengan Penerbitan SP Terhadap Penerimaan PPh.....	53
4.2.3. Analisis Penyebab Perbedaan Tingkat Efektivitas dari Periode 2011-2013.....	59
BAB V KESIMPULAN.....	69
5.1. Kesimpulan.....	69
5.2. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1. Penelitian Sebelumnya	26
4.1. Rekapitulasi Perkembangan Tunggakan PPh di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Periode 2011.....	37
4.2. Rekapitulasi Perkembangan Tunggakan PPh di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Periode 2012.....	38
4.3. Rekapitulasi Perkembangan Tunggakan PPh di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Periode 2013.....	39
4.4. Rekapitulasi Surat Paksa untuk Tunggakan PPh di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Periode 2011-2013.....	40
4.5. Rekapitulasi Perkembangan Penerimaan PPh di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Periode 2011-2013	42
4.6. Perbandingan SP Terbit dan SP Bayar di PPh di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Periode 2011-2013.... ..	44
4.7. Rekapitulasi Penagihan Tunggakan PPh dengan Surat Paksa PPh di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	46
4.8. Perbandingan Nilai Pencairan Tunggakan PPh PPh di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	47
4.9. Tingkat Efektivitas Penagihan Tunggakan PPh dengan Surat Paksa di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Periode 2011-2013	50
4.10. Tingkat Kontribusi Pencairan Tunggakan PPh dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Tunggakan PPh di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	55
4.11. Perbedaan Tingkat Efektivitas Penagihan Tunggakan PPh dengan Surat Paksa PPh di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Periode 2011-2013	59

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1. Kerangka Pemikiran.....	29
3.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	33

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|-------------|--|
| Lampiran 1 | Surat Permohonan Izin Penelitian kepada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu |
| Lampiran 3 | Surat Pemberian Izin Riset dari Kementerian Keuangan RI Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung kepada; Kepala KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya |
| Lampiran 4 | Lembar Persetujuan Menjadi Lokasi Penelitian (Riset) dari KPP Pratama Palembang Seberang Ulu |
| Lampiran 5 | Surat Pernyataan telah Menyelesaikan Riset di Linkungan DJP dan Bersedia Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar Hasil Riset untuk Keperluan Dokumentasi di Perpustakaan DJP |
| Lampiran 6 | Struktur Organisasi di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu |
| Lampiran 7 | Rekapitulasi Surat Paksa Tagihan Tunggakan PPh KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Tahun 2011-2013 |
| Lampiran 8 | Perkembangan Piutang PPh KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Tahun 2011-2013 |
| Lampiran 9 | Perkembangan Penerimaan PPh KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Tahun 2011-2013 |
| Lampiran 10 | Hasil Wawancara Langsung Penulis dengan Seksi Penagihan Seksi Penagihan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu |
| Lampiran 11 | Form Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa |
| Lampiran 12 | Agenda Konsultasi dari Pembimbing I dan Pembimbing II |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Besarnya jumlah penerimaan suatu Negara akan mempengaruhi perkembangan perekonomian dalam negerinya. Sehingga, Indonesia dituntut untuk mengoptimalkan berbagai sumber penerimaannya terutama sektor pajak dari berbagai kantor wilayah pajak yang tersebar di Indonesia. Pajak merupakan iuran wajib dan bersifat memaksa yang dipungut pemerintah (fiskus) dari masyarakat untuk disetorkan kepada kas negara, sehingga menjadikannya sebagai salah satu sumber penerimaan yang paling banyak menyumbang dalam penerimaan negara Indonesia. Meskipun, pajak yang dipungut dari masyarakat Indonesia menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya, tapi pada kenyataannya masih sering kali dijumpai Wajib Pajak (WP) yang melakukan tunggakan pajak.

Tunggakan pajak terjadi, jika WP mengabaikan kewajibannya membayar pajak yang berakibat pada penurunan jumlah penerimaan pajak. Terbukti, berdasarkan artikel yang berjudul "Target Penerimaan Pajak" oleh Anna Suci Perwitasari yang diposkan Kamis, 30 Mei 2013/22:10 WIB, diketahui bahwa proyeksi penerimaan pajak mencapai Rp 916,435 triliun dengan pencairan tunggakan pajak maksimum, diproyeksi bisa mencapai Rp 16 triliun karena

sulitnya tunggakan pajak untuk dicairkan meskipun target pajak untuk tahun 2013 telah diturunkan.

Jika hal tersebut terus berlangsung, maka tunggakan pajak akan membengkak dan kian membebani administrasi fiskus, bahkan sangat mungkin akan mengganggu penerimaan negara dan penerimaan daerah (PAD). Sehingga, upaya fiskus sebagai pemungut pajak diperlukan untuk melakukan pencairan tunggakan pajak yang bergantung pada kedua belah pihak, baik pemerintah sebagai aparat perpajakan (fiskus) maupun masyarakat sebagai wajib pajak atau yang dikenai pajak.

Tunggakan pajak dapat diatasi fiskus dengan menempuh langkah *law enforcement* (penegakan hukum) untuk menagih tunggakan pajak, seperti penagihan pasif dengan cara menerbitkan Surat Teguran. Jika dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak penerbitan Surat Teguran, kewajiban pajak juga belum dipenuhi oleh Wajib Pajak (WP), baru dilakukan penagihan aktif dengan cara menerbitkan Surat Paksa berdasarkan UU No. 19 Tahun 2000 untuk pajak pusat maupun pajak daerah karena pada hakikatnya pajak itu dapat dipaksakan.

Hal ini senada dengan Jurnal Ilmiah Vol. 11, No. 3, September 2012 yang berjudul "Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur" oleh Pandapotan Ritonga yang menyebutkan bahwa dengan menggunakan Uji t dan Koefisien Determinasi, konstanta yang dihasilkan sebesar -5,4 artinya apabila penagihan pajak dengan surat paksa tidak digunakan, maka kepatuhan wajib pajak turun sebesar -5,4 % dan koefisien regresi variabel penagihan pajak dengan surat paksa

(X) sebesar 0,729, artinya terjadi pengaruh yang positif antara penagihan pajak dengan surat paksa.

Tapi, sebaliknya artikel di (www.pajak.go.id) yang diposkan Kamis, 12 September 2013/ 14:26 WIB disebutkan bahwa justru jumlah piutang pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat akibat adanya *law enforcement* yang tinggi. Hal ini senada dengan Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi Vol.1 No. 3 September 2011 oleh Titin Vegirawati dengan judul ”Hubungan Antara Penerbitan Surat Tagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang” yang menyebutkan bahwa justru semakin banyak surat Tagihan pajak, maka jumlah penerimaan pajaknya menjadi kecil dan sebaliknya semakin sedikit jumlah penerbitan surat tagihan pajak, maka jumlah penerimaan pajaknya akan semakin besar. Sementara, artikel Finance and Tax or Everything yang diposkan 1/09/2013 01:46:00 PM mencatat informasi bahwa PPh adalah salah satu jenis pajak yang tidak mencapai target dengan gap terlalu besar, hampir mencapai 10%. Padahal, PPh merupakan andalan dari penerimaan pajak yang paling besar menyumbang ke kas negara. Kemudian, berdasarkan artikel TAF Institute yang diposkan Kamis, 05 September 2013/13:00 WIB diperoleh informasi bahwa penerimaan PPh cenderung tidak banyak mengalami peningkatan seperti PPh non-migas yang hanya naik sebesar 6,28% saja dari target yaitu dari Rp255,73 triliun menjadi Rp271,8 triliun. Sehingga, besar kemungkinan bahwa salah satu penyebab penerimaan PPh tahun 2013 menurun juga karena banyaknya tunggakan PPh yang sulit dicairkan walaupun telah

menerapkan *law enforcement* dengan penagihan aktif seperti penerbitan surat paksa.

Sedangkan, berdasarkan Jurnal Akuntansi Vol. 2, No. 1, Agustus 2011 yang berjudul "Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif dalam Usaha Mencairkan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Taman Sari Satu Jakarta" oleh Affan Marhaendi yang menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara variabel jumlah surat-surat yang diterbitkan sebagai pelaksanaan tindakan penagihan aktif terhadap variabel jumlah pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Taman Sari Satu Jakarta, namun surat-surat yang diterbitkan tidak banyak mempengaruhi pencairan tunggakan pajak akibat adanya penagihan aktif yang tidak efektif.

Terlebih, adanya penelitian terdahulu dalam Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE) Vol 2, No 1 (2013) oleh Sy. Juniarty berjudul " Efektivitas Penagihan Terhadap Pencairan Piutang Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Pada KPP Pratama Pontianak", menyebutkan bahwa efektivitas penagihan terhadap pencairan piutang pajak di KPP Pratama Pontianak masih belum efektif sehingga memerlukan penerapan prosedur penagihan yang efektif guna mengoptimalkan pencairan piutang pajak di KPP Pratama Pontianak. Adanya kendala dalam penagihan dengan surat paksa membuat tidak semua tunggakan PPh yang ditagih, mengalami perbedaan tingkat efektivitas disetiap periodenya.

Maka, berdasarkan fenomena diatas penulis tertarik melakukan studi kasus terkait penagihan tunggakan PPh dengan surat paksa di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu untuk periode 2011 sampai 2013. Selain, KPP Pratama Palembang

Seberang Ulu merupakan salah satu dari 13 kantor pelayanan pajak di Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung yang turut melakukan penagihan tunggakan PPh dengan cara menerbitkan Surat Paksa berdasarkan UU No. 19 Tahun 2000 sebagai upaya pencairan tunggakan PPh, KPP Pratama Palembang Seberang Ulu juga mencatat banyaknya tunggakan pajak terutama PPh yang dilakukan oleh WP di wilayah pajaknya. Sehingga, judul skripsi yang ditulis oleh penulis berjudul **”Efektivitas Penagihan Tunggakan PPh dengan Surat Paksa di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Periode 2011-2013”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya oleh penulis, maka perumusan masalah dalam skripsi ini adalah;

1. Bagaimana tingkat efektivitas penagihan tunggakan Pajak Penghasilan (PPh) dengan surat paksa di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu untuk periode 2011 sampai 2013?
2. Bagaimana tingkat kontribusi pencairan tunggakan PPh dengan surat paksa terhadap penerimaan PPh di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu untuk periode 2011 sampai 2013?
3. Apakah penyebab perbedaan tingkat efektivitas penagihan tunggakan PPh dengan surat paksa pada setiap periodenya di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, mulai periode 2011 sampai 2013?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan skripsi ini;

1. Mengetahui tingkat efektivitas penagihan tunggakan PPh dengan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan PPh di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu pada periode 2011 sampai 2013.
2. Mengetahui seberapa besar kontribusi pencairan tunggakan PPh dengan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan PPh di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dalam rentang periode 2011 sampai 2013.
3. Mengetahui penyebab perbedaan tingkat efektivitas penagihan tunggakan PPh dengan surat paksa pada setiap periodenya di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, mulai dari periode 2011 sampai 2013.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Sebagai sarana bagi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas penagihan tunggakan PPh yang dilakukan dengan cara penerbitan surat paksa di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

2. Bagi Penulis

Sebagai salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi Strata Satu pada jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi di Universitas Sriwijaya dan menambah ilmu di bidang perpajakan terutama tentang efektivitas penagihan tunggakan PPh dengan Surat Paksa.

3. Bagi Universitas Sriwijaya

Sebagai tambahan informasi tentang penagihan pajak, khususnya tentang efektivitas penagihan tunggakan PPh dengan Surat Paksa yang dilakukan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa jurusan akuntansi khususnya di Universitas Sriwijaya.

1.5. Metodologi Penelitian

1.5.1. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dari rumusan masalah, maka ruang lingkup penelitian yang dipakai oleh penulis berupa penagihan tunggakan PPh yang meliputi PPh 21 OP dan Badan, PPh 22, PPh 23, PPh 25 OP dan Badan, PPh 26, serta PPh Pasal 4 (2) dengan surat paksa yang tercatat di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu untuk periode 2011 sampai periode 2013.

Hal ini, karena KPP Pratama Palembang Seberang Ulu merupakan salah satu dari 13 kantor pelayanan pajak di Kanwil DJP Sumsel dan Babel yang

banyak mencatat tagihan tunggakan PPh yang dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Paksa berdasarkan UU No. 19 Tahun 2000.

1.5.2. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini bersifat kualitatif berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan dari hasil perhitungan tingkat efektivitas dan tingkat kontribusi penagihan tunggakan PPh dengan surat paksa di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu periode 2011-2013.

Penelitian ini dimulai dengan cara memastikan penerapan prosedur penagihan tunggakan Pajak Penghasilan (PPh) dengan surat paksa di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu telah sesuai dengan prosedur penagihan tunggakan Pajak Penghasilan (PPh) dengan surat paksa berdasarkan UU No. 19 Tahun 2000.

Kemudian, penulis mencari seberapa besar tingkat efektivitas dengan cara melakukan perhitungan rasio efektivitas dan rasio kontribusi. Rasio Efektivitas yang digunakan adalah Rasio Efektivitas Penagihan tunggakan PPh dengan penerbitan Surat Paksa, diperoleh dengan cara membandingkan antara penagihan tunggakan PPh yang tercermin pada Surat Paksa Terbit dan pencairan tunggakan PPh yang tercermin pada Surat Paksa Bayar untuk tiga periode terakhir mulai dari periode 2011-2013.

Selanjutnya, penulis Rasio Kontribusi yang digunakan adalah Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak (RPTP) dengan cara membandingkan antara pencairan tunggakan PPh dengan penerimaan PPh di KPP Pratama Palembang

Seberang Ulu, termasuk analisis penyebab perbedaan tingkat efektivitas dan kontribusi, seperti kenaikan dan penurunan pada tiga periode terakhir yakni 2011-2013.

1.5.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis untuk mendukung penelitian dalam skripsi ini memakai dua jenis sumber data, seperti berikut ini;

Menurut **Suprpto (2000:15)**;

a) Data Primer (*Primary Data*)

Adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

Data primer yang digunakan dalam penelitian pada skripsi ini, bersumber dari hasil wawancara langsung dengan staf Seksi Penagihan serta staf Pengelolaan dan Informasi (PDI) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

b) Data Sekunder (*Secondary Data*)

Adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Kegiatan Penagihan Pajak dari Seksi Penagihan Pajak KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, seperti Rekapitulasi Surat Paksa Tagihan Tunggakan PPh, Daftar Tunggakan PPh, Rencana dan Realisasi Program Kerja Seksi Penagihan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, dan Rekapitulasi Penerimaan PPh dari Seksi PDI (OC) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu mulai periode 2011 sampai 2013.

1.5.3.1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis guna mendukung penelitian dalam skripsi ini memakai dua jenis metode pengumpulan data, seperti berikut ini;

Menurut **Suprpto (2000:16)**, ada tiga jenis metode pengumpulan data;

a) Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Adalah pencarian data berupa catatan, dokumen, sebagai pelengkap data primer yang tidak ditemukan di lapangan.

Metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan yang digunakan dalam penelitian berasal dari artikel, berita, jurnal penelitian ekonomi akuntansi, buku perpajakan terkait penagihan dan pencairan tunggakan PPh, UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), Permenkeu No. 24/PMK. 03/2008.

b) Dokumentasi

Adalah suatu proses untuk memperoleh data atau dokumen yang telah dipublikasikan oleh pihak lain yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Data yang dikumpulkan berupa data sekunder yang berupa arsip atau dokumen yang dimiliki oleh KPP Pratama Palembang Seberang Ulu periode 2011-2013 terkait penagihan tunggakan PPh dengan surat paksa.

c) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Adalah metode pengumpulan data langsung ke lapangan melalui narasumber terkait, seperti;

Wawancara (*Interview*)

Merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung terhadap narasumber.

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan staf dari Seksi Penagihan, dan staf Pengolahan Data dan Informasi (PDI) seputar penagihan tunggakan PPh dengan surat paksa di KPP Pratama Seberang Ulu.

1.5.4. Teknik Analisis

Teknik analisis data adalah suatu teknik yang digunakan sebagai alat bantu bagi peneliti untuk mengambil suatu kesimpulan atas sejumlah data penelitian yang telah terkumpul (**Suprpto,2000:21**). Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah Teknik Analisis Kualitatif.

Menurut **Suprpto (2000:31)**;

Analisis Kualitatif adalah analisis yang berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori tersaji dalam format ringkas.

Analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari fenomena yang terjadi di lapangan seputar penagihan tunggakan PPh dengan surat paksa, khususnya di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Berisi data-data perhitungan sekaligus penjelasan tentang rasio efektivitas penagihan tunggakan PPh dengan penerbitan surat paksa, yang diperoleh penulis dengan cara

membandingkan penagihan tunggakan PPh dan pencairan tunggakan PPh, serta perhitungan sekaligus penjelasan tentang rasio kontribusi dengan menggunakan Rasio Penerimaan Tunggakan PPh (RPTP) yang diperoleh penulis dengan cara membandingkan pencairan tunggakan PPh dengan penerimaan PPh di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

1.5.4.1. Teknik Perhitungan Efektivitas

Teknik perhitungan efektivitas yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini terdiri dari dua teknik yaitu;

a) Rasio Efektivitas Penagihan Tunggakan PPh dengan Penerbitan Surat Paksa

Rasio efektivitas penagihan tunggakan PPh dengan penerbitan surat paksa digunakan oleh penulis dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat efektivitas penagihan tunggakan PPh dengan penerbitan surat paksa di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dalam bentuk persentase. Berikut ini rumus perhitungan efektivitas penagihan tunggakan PPh dengan penerbitan surat paksa;

$$\text{Efektivitas Penerbitan} = \frac{\text{Jumlah Pencairan Tunggakan PPh (Rp)}}{\text{Jumlah Penagihan Tunggakan PPh (Rp)}} \times 100 \%$$

(Sumber; Seksi Penagihan KPP Pratama Palembang Seberang Ulu)

Sedangkan, kriteria dalam klasifikasi pengukuran efektivitas dalam bentuk persentase yang menjadi acuan pengukuran tingkat efektivitas penerbitan oleh penulis adalah;

Tabel 1.1
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Klasifikasi Pengukuran Efektivitas (Persentase)	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

(Sumber: Sy.Juniarty,2013)

Tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai < 100%, berarti penagihan tunggakan PPh dengan surat paksa sangat efektif. Sebaliknya, jika hasil persentase yang dicapai > 60% berarti penagihan tunggakan PPh dengan surat paksa tidak efektif di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Periode 2011 sampai 2013.

b) Rasio Penerimaan Tunggakan PPh (RPTP)

Rasio penerimaan tunggakan PPh (RPTP) digunakan oleh penulis dalam penelitian ini untuk mengukur kontribusi pencairan tunggakan PPh bagi penerimaan PPh di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dalam bentuk persentase. Berikut ini dalah rumus untuk melakukan perhitungan Rasio Penerimaan Tunggakan PPh (RPTP);

$$RPTP = \frac{\text{Pencairan Tunggakan PPh (Rp)}}{\text{Penerimaan PPh (Rp)}} \times 100 \%$$

(Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Palembang Seberang Ulu)

Semakin besar nilai dari Rasio Penerimaan Tunggalan PPh (RPTP), maka semakin besar pula kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak khususnya total penerimaan Pajak Penghasilan (PPh). Berikut ini adalah klasifikasi kriteria kontribusi dalam bentuk persentase yang menjadi acuan pengukuran tingkat efektivitas penerbitan oleh penulis adalah;

Tabel 1.2
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Klasifikasi Kriteria Kontribusi (Presentase)	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

(Sumber : Sy. Juniarti, 2013)

Tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai <50%, berarti kontribusi penagihan PPh dengan surat paksa sangat baik untuk total penerimaan PPh. Sebaliknya, jika hasil persentase yang dicapai >10 % berarti kontribusi penagihan PPh dengan surat paksa sangat kurang dalam menyumbang total penerimaan PPh di KPP Pratama Seberang Ulu periode 2011 sampai 2013.

1.6. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Pemilihan judul, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, serta Sistematika Skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini penulis akan menguraikan landasan teori sebagai bahan untuk melakukan pembahasan masalah antara lain adalah pengertian Pajak, Jenis Pajak, Timbul dan Hapusnya Tunggakan Pajak, Sanksi Pajak, Surat Paksa, Isi Surat Paksa, Penerbitan Surat Paksa dan Tata Cara Pemberitahuannya, Manfaat Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pengertian; Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), Tunggakan PPh, Efektivitas, Penerimaan Pajak, Penelitian Sebelumnya, dan Kerangka Pemikiran.

BAB III : GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU

Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum mengenai KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, visi dan

misi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi dari setiap seksi di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, serta data dari KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas dan menjelaskan hasil perhitungan tingkat efektivitas penagihan tunggakan PPh dengan surat paksa terhadap pencairan tunggakan PPh yang dilakukan oleh penulis. Jika tingkat efektivitasnya tinggi, maka pencairan tunggakan PPh akan meningkatkan penerimaan PPh di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu yang tercermin dalam hasil perhitungan Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak (RPTP), termasuk menjelaskan penyebab perbedaan tingkat efektivitas dan tingkat kontribusi yang terjadi pada periode 2011-2013.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan disusun berdasarkan data dan hasil analisa data dari bab sebelumnya, kemudian memberikan saran yang dianggap perlu bagi perkembangan perusahaan, serta mencantumkan Keterbatasan Penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Fidel, 2010. *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*, Jakarta: Murai Kencana.

Ilyas, Wirawan B. 2010, *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Malik, Fauzi. 2008. *Modul Pajak*. Jakarta: Penerbit Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Mardiasmo, 2009. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi. Jogjakarta : Penerbit Andi.

-----., *Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008*.

Siti, Resmi. 2005. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi Kedua. Jakarta : Salemba Empat.

Suprpto. 2000. *Metode Riset*. Jakarta : Penerbit PT Rineka Cipta.

Tim IAI. 2012. *Modul Pelatihan Pajak terapan Brevet A dan B Terpadu*. Cetakan ke 24. Jakarta.

-----., *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000*.

-----., *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*.

-----., *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*.

Waluyo, 2007. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

<http://nasional.kontan.co.id/news/ditjen-target-penerimaan-pajak>

(diakses tanggal 20 September 2013, Pk. 20.30 WIB)

<http://www.pajak.go.id/content/upaya-menurunkan-jumlah-dan-mencairkan-piutang-pajak>

(diakses tanggal 28 September 2013, Pk. 10.45 WIB)

<http://elibrary.palcomtech.ac.id/2013/07/jurnal-jenius-politeknik-palcomtech-vol-1-no-3-september-2011/>

(diakses tanggal 28 September 2013, Pk. 10.50 WIB)

<http://www.taf-consulting.co.id/>

(diakses tanggal 2 Oktober 2013 Pk. 12.15 WIB)

<http://repository.gunadarma.ac.id/handle/123456789/1977>

(diakses tanggal 2 Oktober 2013 Pk. 12.30 WIB)

<http://ejournal.gunadarma.ac.id/files/journals/8/articles/306/submission/review/306-887-1-RV.pdf>

(diakses tanggal 2 Oktober 2013 Pk. 12.45 WIB)

<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/ejafe/article/view/1257>

(diakses tanggal 2 Oktober 2013 Pk. 12.50 WIB)

[http://lppm.trigunadharma.ac.id/public/fileJurnal/hp0CJurnal%2011-3-2012%20Pandapotan 7%20Yes.pdf](http://lppm.trigunadharma.ac.id/public/fileJurnal/hp0CJurnal%2011-3-2012%20Pandapotan%207%20Yes.pdf)

(diakses tanggal 2 Oktober 2013 Pk. 13.00 WIB)